

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS)

Sri Hartono^{1*}, Bambang Agus Pramuka², Eliada Herwiyanti³

¹BPKP Kantor Pusat Jakarta, Indonesia

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin No. 708, Purwokerto 53122, Jawa Tengah, Indonesia

*Email corresponding author: hartono.sri191@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas (DPPKAD). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pejabat dari internal DPPKAD sebagai informan untuk memberikan pemahaman apa yang mendorong peningkatan PAD Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditemukan beberapa faktor pendorong peningkatan PAD Kabupaten Banyumas, antara lain: (1) Adanya BUMD sebagai penyumbang PAD, (2) Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait pelaksanaan pemungutan PAD, (3) Sistem *Reward* yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD dan (4) Adanya inovasi yang dilakukan sebagai pendorong penerimaan PAD yang meliputi (a) Melakukan konfirmasi terhadap wajib pajak, (b) Pembentukan Tim Terpadu, (c) Penilaian NJOP PBB, serta (d) Melakukan Himbauan dan Sosialisasi atas Pajak Daerah.

Kata Kunci: PAD, Pemerintah Daerah, Pajak Daerah isi, format, artikel.

Abstract

This study aims to determine the factors driving the increase in local revenue (PAD) to the Government of Banyumas. This research was conducted at the Department of Revenue Financial Management and Asset Banyumas (DPPKAD). The study was conducted with a qualitative approach to the use of internal DPPKAD officials as informants to provide valid informations what drives revenue generating Banyumas.

According to the results of research and analysis, several factors driving the increase in revenue Banyumas, among others: (1) The existence of local enterprises (BUMD) as a contributor to revenue, (2) existence of policies undertaken by the Government of Banyumas Regency relevant for collection of the PAD, (3) Reward System granted to the parties relating to the acceptance of PAD and (4) the innovation made as a driver of local revenue from PAD which includes (a) Conformation to the taxpayer, (b) The Integrated team, (c) Revaluated property and land value of Property tax, and (d) Perform Socialization of a Local Taxes.

Keywords: PAD, Local Government, Local Taxes

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 7 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" Sesuai dengan pengertiannya, otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, ditandai dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi

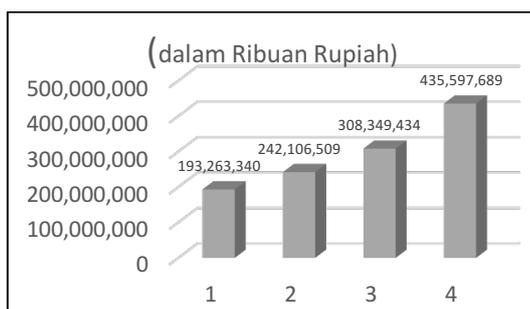
kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri dan optimal.

Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang berujung pada terjadinya efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah dirasa mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang dirasa tidak memberikan efek pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya terhadap daerah adalah menjadikan daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri.

Salah satu tolok ukur kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu barometer perekonomian di Indonesia, tak terkecuali pada sektor keuangan maupun tata kelola pemerintahan daerah. Dengan fakta tersebut, perlu diperhatikan beberapa data terkait kemandirian pemerintah daerah, salah satunya pendapatan asli daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki pendapatan asli daerah yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 sampai dengan 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama dalam hal pendapatan asli daerah. Data pendapatan dan grafik peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 s.d. 2014 disajikan dalam Gambar 1.1:



Gambar 1.1 Grafik Peningkatan PAD Banyumas Tahun 2011 s.d 2014.

Sumber: diolah dari bps.go.id dan djpk.kemenkeu.go.id

Menurut data statistik, tingkat kemandirian pemerintah daerah di Indonesia masih relatif rendah. Salah satu indikator yang mencerminkan tersebut adalah derajat desentralisasi. Muluk (2009: 24) menyebutkan terdapat beberapa faktor berbeda yang dapat dijadikan indikator derajat desentralisasi. Salah satu faktor yang disebutkan adalah derajat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat dibandingkan penerimaan asli daerah maka berarti semakin besar ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat. Data yang diolah dari djpk.kemenkeu.go.id tahun 2014 mengungkapkan (data terlampir), dari 523 pemerintah daerah di Indonesia (termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) rata-rata derajat

desentralisasi adalah sebesar 11,75%, sedangkan untuk kategori kabupaten yaitu sebanyak 402 kabupaten memiliki rata-rata derajat desentralisasi sebesar 8,24%. Rata-rata derajat desentralisasi seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 13,91% (29 Kabupaten). Kabupaten Banyumas memiliki rasio sebesar 18,87% atau yang tertinggi pada kategori kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil menunjukkan prestasi yang gemilang dalam peningkatan pendapatan, utamanya pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pendapatan yang lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu empat tahun. Adanya fenomena tersebut mendasari dilakukannya penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Banyumas.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan tentang peningkatan pendapatan asli daerah, terutama dengan keberhasilan perolehan hasil dan progress peningkatan pendapatan, fenomena ini memunculkan sejumlah pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah?
3. Apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di masa mendatang dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah?
4. Apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait Penerimaan Asli Daerah di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas.
2. Mendefinisikan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Mendefinisikan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.
4. Menganalisis tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. TELAAH PUSTAKA

1. Desentralisasi

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian desentralisasi sebagai berikut: *“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Sesuai dengan pengertian di atas, dipahami bahwa otonomi daerah merupakan bagian yang melekat dari implementasi sistem desentralisasi. Dalam suatu negara yang menganut kebijakan desentralisasi, maka ada penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pusat untuk menjadi kewenangan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa *“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Menurut Bastian (2006:354) tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki potensi dan karakteristik masing-masing, maka dimungkinkan adanya perbedaan kebijakan yang dilakukan pada setiap pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen yang secara etimologi berasal dari kata "kelola" dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Para ahli memberikan beberapa pengertian tentang definisi dari pengelolaan, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Prajudi (1990) dalam Adisasmita (2011: 21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Balderton (dalam Westra, 1983:14) dalam Adisasmita (2011:21), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Hamalik (1993:18) dalam Adisasmita (2011) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (1993:8) dalam Adisasmita (2011) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

3. APBD

Penyelenggaraan otonomi mengakibatkan daerah mempunyai hak untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, mengelola kekayaan daerah, dan memungut pajak daerah serta retribusi daerah. Daerah juga mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Beberapa Prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan wajar yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja diselenggarakan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD/Perubahan APBD, dan (3) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui kas umum daerah.

4. PAD

Sebagai salah satu komponen sumber Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting di dalam mekanisme keuangan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

5. Pajak dan Retribusi Daerah

Lahirnya UU Nomor 28 tahun 2009, memberikan penjelasan mendalam tentang Pajak daerah. Definsi Pajak Daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

B. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian oleh Bonet et al (2013) berjudul *“Expanding Local Revenues for Promoting Local Development”*.

Penelitian yang dilakukan oleh Bonet, Jaime, Fretes Ciblis dan Vicente berjudul *“Expanding Local Revenues for Promoting Local Development”* dari Universitas Santiago de Compostela, Spanyol tahun 2013. Penelitian ini dilakukan pada negara-negara Amerika Latin. Penelitian ini menggambarkan perbedaan yang sangat signifikan antara penerimaan dan pengeluaran negara bagian/provinsi di negara-negara amerika latin. Penelitian ini menyebutkan bahwa negara bagian/provinsi tersebut sangat bergantung dari transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan kemampuan ekonomi negara bagian/provinsi menjadi rentan dan sulit diprediksi. Penelitian ini memberikan beberapa alternatif bagi pemerintah negara bagian/provinsi untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Penelitian ini memberikan beberapa gambaran tentang beberapa faktor yang dapat meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain dengan melakukan Reformasi dalam bidang perpajakan, mengeksplorasi pajak atas properti dan melakukan penilaian aset, memperkuat SDM perpajakan, memperluas basis perpajakan, mengenakan pajak pribadi, memungut pajak atas barang dan jasa, serta mengenakan pajak lingkungan hidup. Dengan gambaran tersebut, peneliti akan mendapatkan masukan tentang metodologi maupun strategi tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini hanya berfokus pada satu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran tentang strategi yang berhasil dilakukan oleh subjek penelitian.

2. Penelitian oleh Carlos Silvani & Katrerine Baer (1997) berjudul *“Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines”*

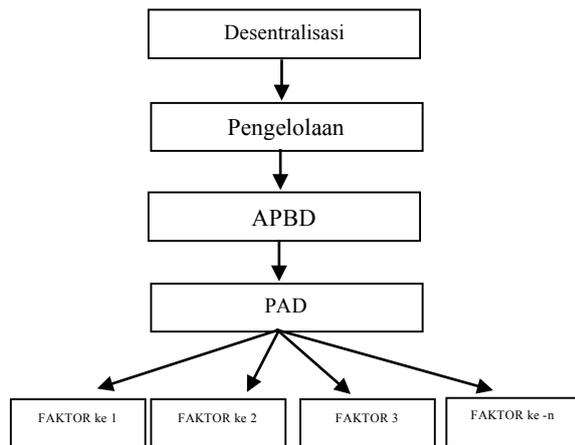
Penelitian yang dilakukan oleh Carlos Silvani dan Katrerine Baer dari *Fiscal Affairs Departement* berjudul *“Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines”* pada tahun 1997 ini mendiskusikan tentang beberapa prinsip pedoman dasar yang menjanjikan kesuksesan reformasi dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini menjabarkan

beberapa hal tentang reformasi perpajakan, seperti mengurangi kompleksitas sistem perpajakan, menumbuhkan kesadaran perpajakan, perbedaan perlakuan kepada wajib pajak berdasarkan potensi pendapatan mereka, dan reformasi manajemen yang efektif. Penelitian ini juga mendiskusikan faktor penghambat dalam efektivitas administrasi perpajakan.

Penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti tentang faktor-faktor penghambat di dalam reformasi perpajakan. Kontribusi yang diharapkan adalah dengan memahami beberapa faktor penghambat yang ada, akan membantu ditemukannya solusi dan jawaban mengapa penerimaan asli daerah yang menjadi subjek penelitian bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut adalah Kerangka Pemikiran yang digunakan untuk membahas fenomena yang terjadi:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN DAN SUMBER DATA

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) di dalam Moloeng (2010:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan orang dan atau perilaku yang dapat diamati. Definisi lain dikemukakan Denzin dan Licoln (1987) dikutip oleh Meolong (2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Moloeng (2010) menyebutkan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung kegunaan tinggi atau bermakna. Data yang bermakna adalah data yang sesungguhnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor pendorong Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas, Strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan spa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melakukan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2010) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman

video/audio, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

B. TAHAPAN ANALISIS DATA

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data meliputi proses pemilihan data-data yang dirasa penting, proses pembuatan kategori/kodifikasi, dan membuang data yang tidak penting. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu proses menemukan faktor-faktor pendorong peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Penyajian data (*data display*)
Tahapan selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data akan memudahkan proses pemahaman atas apa saja yang terjadi, dan membantu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari proses selanjutnya. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif. Teks naratif akan memberikan gambaran lebih luas dan jelas atas apa yang diperoleh selanjutnya.
3. *Conclusion Drawing/Verification*
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini dapat bersifat sementara, dan dapat berubah bila ditemukan data baru yang mendukung dan kuat pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan diskripsi, gambaran dan penjelasan tentang faktor-faktor pendorong pendapatan PAD Kabupaten Banyumas agar menjadi jelas dan menjawab pertanyaan penelitian.

C. UJI KEABSAHAN DATA

1. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)
Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan Meningkatkan Ketekunan, yaitu teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya Triangulasi, Mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sumber data atau perspektif dari informan akan menambah validitas penelitian.
Member checking dilakukan dengan membawa laporan akhir atau diskripsi-diskripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan informan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan tersebut sudah akurat. Hal ini berarti peneliti akan membawa bagian-bagian dari hasil penelitian yang sudah diolah kepada informan. Penggunaan bahan referensi dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendukung pembuktian data yang ditemukan pada saat penelitian. Bahan referensi dapat berupa foto, maupun hasil wawancara yang dibuktikan dengan adanya rekaman wawancara maupun dokumen lain yang mendukung.
2. Pengujian *Transferability*
Uji ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif agar pengguna dapat memahami dan memanfaatkan hasil penelitian ini, maka laporan yang dibuat harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Pengujian Kepastian (*Confirmability*)
Menurut Sugiyono (2014), menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7° 15' 05" - 7° 37' 10" Lintang Selatan dan antara 108° 39' 17" - 109° 27' 15" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Banyumas terletak di lereng Gunung Slamet. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah berupa daratan seluas 1.327,59 km². Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok (105,34 km²) dan Kecamatan Purwokerto Barat sebagai kecamatan dengan luas kecamatan terkecil (7,04 km²).

DPPKAD Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah daerah sub bidang administrasi keuangan daerah pada urusan pemerintahan daerah bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. DPPKAD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2010, menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif memerlukan informan untuk dijadikan sebagai sumber data. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap paham, bersinggungan langsung dan berkompeten dalam memberikan penjelasan serta pendapat tentang objek penelitian yakni faktor-faktor yang mendorong pendapatan asli daerah. Informan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas diambil sebagai informan utama dengan maksud untuk mengetahui faktor dan strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendorong Penerimaan PAD di lingkungan Kabupaten Banyumas. Informan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah informan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengetahuan dan jabatan struktural yang berkaitan langsung dengan pendapatan di DPPKAD Kabupaten Banyumas.

C. Analisis

1. Faktor-faktor yang mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas
 - a. Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki BUMD sebagai penyumbang PAD
Hasil wawancara dengan informan menyebutkan bahwa adanya BUMD memberikan kontribusi terhadap PAD Banyumas. Wawancara tersebut didukung oleh data yang berasal dari LKPD Kabupaten Banyumas. Hasil wawancara dan data pendukung tersebut memberikan gambaran bahwa salah satu faktor pendorong tingginya PAD pada Kabupaten Banyumas adalah adanya BUMD yang memberikan kontribusi terhadap bersarnya PAD pada Kabupaten Banyumas.
 - b. Faktor Kebijakan
Kebijakan prosedur pemungutan pajak memberikan solusi untuk melakukan pemungutan pajak yang terkendala regulasi. Tanpa adanya kebijakan, proses pemungutan pajak bisa saja tidak terlaksana dan menghambat realisasi penerimaan pajak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor dalam rangka mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna memaksimalkan penerimaan daerah.
 - c. Pemberian *Reward* kepada Pegawai

Reward yang ditawarkan oleh Pemkab Banyumas dapat dikategorikan menjadi 2 hal yaitu *reward* yang ditawarkan kepada Desa/Kelurahan dan kepada pegawai. Pemberian *reward* oleh Pemkab Banyumas didasarkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Informasi tentang pemberian insentif beserta dampaknya terhadap kinerja didapatkan dari beberapa informan.

Reward yang diberikan kepada desa merupakan *reward* yang dijanjikan kepada desa/kelurahan yang dapat menyelesaikan piutang PBB di masa lampau dan desa/kelurahan yang mampu mencapai minimal 90% dari baku. Pemberian *reward* kepada desa merupakan respon untuk mendorong peningkatan PAD dari sektor PBB yang sempat mengalami penurunan di tahun 2014.

2. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Banyumas dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Melakukan Konfirmasi kepada Wajib Pajak (WP)

Konfirmasi yang dilakukan oleh DPPKAD kepada WP bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan transaksi yang disampaikan kepada fiskus (DPPKAD) sudah sesuai atau belum dengan potensi ataupun sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.
 - b. Pembentukan Tim Terpadu

Tim terpadu merupakan salah satu inovasi yang muncul di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Tim terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti DPPKAD, Satpol PP, ESDM, Dinporabudpar dan BPMPP. Tugas tim terpadu meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi dan penertiban. Di dalam pelaksanaannya tim terpadu menggambarkan koordinasi yang baik antar SKPD dalam melaksanakan optimalisasi PAD, selain itu Tim terpadu juga memiliki strategi pemasangan *sticker* yang bertuliskan “belum membayar pajak” guna memberikan peringatan terhadap para WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tugas pamungkas tim terpadu adalah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang menjadi senjata pamungkas apabila WP tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.
 - c. Penilaian NJOP PBB

Upaya kedua yang dilakukan Pemkab Banyumas untuk mendorong penerimaan PBB adalah dengan melakukan penilaian ulang NJOP. Meskipun ada penurunan tarif yang efektif berlaku pada tahun 2014, tetapi jika dasar pengenaan (NJOP) dinaikkan, secara otomatis penerimaan PBB juga akan naik.
 - d. Melakukan Himbauan dan Sosialisasi

Himbau dan sosialisasi dimaksudkan agar WP mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai WP. Himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyumas menggunakan berbagai cara, antara lain dengan mendatangi WP, mengumpulkan WP untuk keperluan Sosialisasi, menggunakan media penyiaran seperti radio dan memanfaatkan media-media lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di masa mendatang

Hasil wawancara kepada para informan menunjukkan bahwa di masa yang akan datang Pemkab Banyumas ingin menerapkan secara penuh penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan, pembayaran dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudahan melakukan kewajiban pembayaran dan segala yang disediakan diharapkan menjadi pendorong peningkatan PAD Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang.
4. Capaian Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait Pendapatan Asli Daerah di Masa mendatang

Basis Pendapatan dan Realisasi PAD yang tinggi akan memperkuat keuangan daerah khususnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemampuan keuangan yang kuat akan mengurangi hambatan terkait pendanaan dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Capaian yang diharapkan tersebut juga sesuai dengan penjabaran ke 3 dari Visi DPPKAD Kabupaten Banyumas yaitu “Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas adalah sebagai unsur pelaksana teknis operasional, yang mendukung

dan mempercepat akselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018”.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:
 - a. Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah,
 - b. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait pelaksanaan pemungutan PAD, dan
 - c. Sistem *Reward* yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD.
2. Strategi yang dilakukan juga menjadikan faktor inovasi sebagai pendorong penerimaan PAD. Strategi yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Melakukan konfirmasi terhadap wajib pajak,
 - b. Pembentukan Tim Terpadu,
 - c. Penilaian NJOP PBB, dan
 - d. Melakukan Himbauan dan Sosialisasi atas Pajak Daerah.
3. Upaya peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Banyumas di masa mendatang difokuskan pada pengaplikasian teknologi informasi berupa aplikasi terintegrasi guna memudahkan wajib pajak maupun fiskus dalam melaksanakan tugasnya.
4. Harapan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait PAD di masa yang datang adalah dengan basis pendanaan yang kuat, maka pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas akan semakin baik dan dapat membangun Banyumas.

B. Implikasi

1. Faktor-faktor pendorong peningkatan PAD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah adanya BUMD sebagai penyumbang PAD, adanya kebijakan dalam proses pemungutan pajak, sistem *reward* yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan PAD, selain faktor tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan inovasi dengan menerapkan beberapa strategi terkait PAD, dengan demikian penelitian ini memberikan informasi sebagai acuan penelitian di masa mendatang.
2. Faktor-faktor pendorong peningkatan PAD yang ditemukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar semakin fokus dalam meningkatkan realisasi PAD dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah lain dalam rangka melaksanakan optimalisasi PAD.

Singkatan dan Akronim

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	= Aparatur Sipil Negara
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPPKAD	= Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
Perda	= Peraturan Daerah
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Edisi Pertama*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bonet, Jaime dan Ciblis, Vicente Freaaas. 2013. Expanding Local Revenues for Promoting Local Development. *Urban Public Economics Review*. núm. 19, julio-diciembre, 2013, pp. 64-87.
- BPS Kabupaten Banyumas. 2011. *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2011*. Banyumas.
- _____. 2013. *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2013*. Banyumas.
- _____. 2014. *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2014*. Banyumas.
- _____. 2015. *Kabupaten Banyumas dalam Angka 2015*. Banyumas.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah; Pedoman untuk eksekutif dan legislatif*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah; seri bunga rampai manajemen keuangan daerah*. Edisi Kedua. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Pembentukan daerah-daerah otonom di Indonesia sampai dengan tahun 2014. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Moeleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & pemerintahan Daerah*. Penerbit ITS Press. Surabaya.
- Neolaka, Amos. 2014. *Metode penelitian dan Statistik*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- _____. 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Sapnapramesti. 2012. *Pengukuran Kinerja Pemerintah dengan Konsep Value for money*. <http://adindapramesti.blogspot.co.id/>, Diakses 21 September 2016.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Empat. Penerbit Salemba empat. Jakarta.
- Silvani, Carlos and Baer, Katerine. 1997. Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines. *A Working paper of the International Monetary Fund*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Suwarto, FX. 2011. *Perilaku Keorganisasian*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.